

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan Politik merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warga negara melalui penyampaian pengetahuan mengenai hak, kewajiban, nilai, serta norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses tersebut bertujuan membentuk orientasi politik individu yang kritis, etis, dan partisipatif dalam sistem demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Kantaprawira (2006) bahwa pendidikan politik merupakan kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam kehidupan perpolitikan negara. Dalam implementasinya, pendidikan politik dapat berlangsung melalui berbagai saluran, mulai dari lembaga pendidikan, pemerintah, partai politik hingga organisasi kemasyarakatan, dengan metode yang beragam seperti dialog, diseminasi informasi, maupun pengalaman langsung di lapangan.

Sebagai sebuah konsep yang luas, pendidikan politik mencakup dua bentuk utama, yakni pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih. Pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pembentukan kesadaran bangsa melalui penanaman tentang hak dan kewajiban warga negara, dasar-dasar politik, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang diajarkan secara formal dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun pendidikan pemilih

diselenggarakan dan diberikan oleh pemerintah, penyelenggara Pemilu, akademisi, media massa, partai politik serta masyarakat melalui berbagai metode seperti penyampaian informasi, ceramah, diskusi, dan simulasi kepada pemilih di dalam dan di luar periode Pemilu. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam Pemilu, sekaligus membantu penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya guna memastikan Pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun demikian, pendidikan politik dalam bentuk formal tidak muncul begitu saja, melainkan berakar dari proses sosialisasi politik yang lebih dahulu memperkenalkan individu pada nilai, norma, dan orientasi politik sejak dini.

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan bagian dari proses sosialisasi politik yang berlangsung sepanjang hidup, akan tetapi memiliki sifat yang lebih terarah dan sistematis. Dalam ilmu politik, konsep *political socialization* atau sosialisasi politik dikenal sebagai pijakan utama untuk memahami bagaimana individu membentuk sikap dan orientasi politiknya. Muchtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2018:42) dalam bukunya *Perbandingan Sistem Politik* telah menyunting tulisan Gabriel A. Almond tentang "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi". Almond memberikan batasan mengenai sosialisasi politik, menurutnya Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak sejak masa kanak-kanaknya, telah belajar memahami sikap-sikap dan harapan-

harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya. Pembelajaran politik ini sejatinya sudah dimulai sejak masa kanak-kanak, di mana keluarga menjadi agen pertama dan utama karena merupakan tempat pertama individu melakukan interaksi dengan pihak lain (Haryanto, 2018).

Seiring perkembangan individu, proses sosialisasi politik tidak berhenti pada lingkungan keluarga semata, melainkan meluas melalui berbagai agen lain seperti *peer grup*, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Dengan demikian, sosialisasi politik berfungsi sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan mengapa pendidikan politik oleh partai menjadi sangat penting, karena kualitas sosialisasi yang dijalankan partai akan turut menentukan kualitas orientasi politik masyarakat dalam jangka panjang.

Kewajiban partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik bersifat permanen dan tidak terikat pada momentum elektoral tertentu. Pendidikan politik yang dijalankan partai secara efektif dan berkelanjutan memungkinkan warga negara untuk memahami hak dan kewajiban politiknya, membangun kesadaran tentang mekanisme penyelenggaraan negara, serta mengembangkan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Pada saat yang sama, pendidikan politik juga berperan penting bagi partai politik itu sendiri untuk memperkuat kapasitas kader sebagai pelaksana

kegiatan partai agar mampu berperan dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aktor demokrasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, pendidikan politik dapat dipandang bukan sekadar aktivitas yang bersifat seremonial atau insidental, melainkan sebagai investasi jangka panjang partai terhadap kualitas demokrasi secara menyeluruh.

Kewajiban partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik tidak hanya bersifat moral, melainkan juga telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas menetapkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga merinci bahwa pendidikan politik mencakup pendalaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memahami hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika serta budaya politik, serta melaksanakan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendidikan politik tidak hanya dilakukan pada saat kampanye atau seremonial menjelang Pemilu, melainkan harus menjadi proses berkelanjutan yang membentuk karakter politik masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kader partai.

Negara juga berperan penting dalam mendukung fungsi edukatif partai politik melalui dukungan finansial. Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ditegaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Ketentuan tersebut secara eksplisit menempatkan negara sebagai mitra partai dalam memperkuat demokrasi melalui investasi pada pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Posisi strategis partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud praktik demokrasi di Indonesia semakin menegaskan pentingnya fungsi pendidikan politik. Secara konstitusional, partai politik merupakan satu satunya lembaga yang diakui UUD 1945 dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, partai politik juga memegang kendali besar dalam menyeleksi pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, hingga menentukan pimpinan lembaga-lembaga negara strategis. Dengan kewenangan yang begitu luas dan strategis tersebut, partai seharusnya tidak hanya berorientasi pada perolehan kekuasaan elektoral, tetapi juga mengemban tanggung jawab substantif dalam menyelenggarakan pendidikan politik sebagai wujud kontribusinya terhadap kualitas demokrasi dan konsolidasi negara hukum. Namun demikian, sejak ditetapkan undang-undang partai politik, partai politik di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi agen pendidikan politik, tetapi terdapat kesenjangan yang mencolok antara ketentuan normatif tersebut dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun undang-undang mewajibkan partai

politik menjalankan pendidikan politik secara berkelanjutan dan negara telah mengalokasikan dana publik menjadi APBN/APBD untuk mendukungnya, fungsi tersebut dalam praktiknya belum dilaksanakan secara optimal.

Kusuma, Widiati, dan Suryani (2020) menegaskan bahwa partai politik belum mampu melakukan fungsi pendidikan politik secara penuh, baik dalam lingkup internal partai maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sardini (2011) yang menegaskan bahwa partai politik dalam praktiknya cenderung hanya menjalankan fungsi rekrutmen politik semata, yakni sebagai kendaraan bagi para calon yang ingin berkuasa. Partai politik juga hanya aktif menjelang Pemilu untuk mencari dukungan, sementara setelahnya kegiatan partai nyaris tidak terdengar sama sekali. Akibatnya, pendidikan politik bagi masyarakat tereduksi hanya sebatas pemberian suara saat Pemilu berlangsung, dan masyarakat menjadi rentan untuk di provokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa partai politik masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan peran idealnya sebagai pilar demokrasi.

Dalam tatanan praktis, pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan umumnya bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan, dengan penjadwalan yang kerap bertepatan dengan momentum menjelang pemilihan umum semata. Berdasarkan hasil diskusi yang diselenggarakan oleh MPR RI bersama Universitas Sriwijaya (2023), diketahui bahwa sebagian besar partai politik masih melaksanakan pendidikan politik dengan

pendekatan yang dangkal dan tidak substantif, serta lebih berorientasi pada mobilisasi dukungan elektoral daripada pembentukan kesadaran politik masyarakat yang kritis dan rasional. Materi yang disampaikan pun kerap hanya mencakup sosialisasi program partai dan imbauan memilih, tanpa menyentuh aspek pendalaman ideologis maupun nilai-nilai demokrasi secara mendalam. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik sering dilakukan dengan tingkat keseriusan yang rendah akibat keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan prioritas internal partai. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan politik pun kerap dialihkan kepada organisasi kemasyarakatan, aktivis, atau lembaga pendidikan, sehingga partai politik tidak sepenuhnya menjalankan perannya secara langsung. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya pelaksanaan pendidikan politik di berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kegiatan partai.

Persoalan tersebut diperparah oleh empat masalah struktur yang secara bersamaan melemahkan kapasitas partai politik sebagai agen pendidikan. KPK (2024) mengidentifikasi bahwa tidak adanya standar etik yang baku, mekanisme kaderisasi dan rekrutmen yang tertutup, ketidakseimbangan sumber pendanaan, serta lemahnya demokrasi internal merupakan persoalan yang saling memperkuat satu sama lain dan membentuk siklus patologis dalam tubuh partai. Ketiadaan standar etik membuat kader sulit menginternalisasi nilai integritas, rekrutmen yang nepotistik melahirkan kader yang lebih loyal pada elite ketimbang konstituen, ketimpangan pendanaan membuka ruang politik transaksional, dan lemahnya demokrasi internal mendorong dominasi elite dalam pengambilan keputusan

strategis partai. Pada akhirnya, keempat persoalan tersebut menyebabkan energi organisasi lebih banyak tersedot pada kepentingan elite dan kontestasi elektoral, sehingga pendidikan politik yang seharusnya membentuk kader berintegritas dan meningkatkan kesadaran masyarakat justru cenderung hadir hanya sebagai formalitas yang tidak berdampak secara substantif.

Berbagai persoalan internal yang melanda partai politik tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi partai. Hal ini terkonfirmasi melalui temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2023 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya sekitar 58 persen, jauh lebih rendah dibandingkan lembaga negara lain seperti TNI atau KPK.

**Tabel 1. 1 Kepercayaan Terhadap Lembaga (Survei Nasional LSI, 10–17 Februari 2023)**

<b>Lembaga</b>	<b>Sangat percaya (%)</b>	<b>Cukup percaya (%)</b>	<b>Kurang percaya (%)</b>	<b>Tidak percaya sama sekali (%)</b>	<b>TT/TJ (%)</b>
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	29	64	3	1	3
Presiden	26	59	11	2	3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	13	55	24	3	5
Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)	12	63	20	3	3
Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan	11	61	19	3	6
Kementerian/lembaga	11	63	18	2	6

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Komisi Pemilihan Umum (KPU)	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Media Massa	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Kejaksaan Agung	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Pengadilan	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Kepolisian	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
Partai Politik	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/DPRD	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Sumber: Lembaga Survei Indonesia.or.id, 2023.

Melalui tabel 1.1 dapat dilihat bahwa partai politik menempati salah satu posisi dengan tingkat kepercayaan publik terendah, yakni sekitar 58 persen, sejajar dengan DPR/DPRD yang memperoleh tingkat kepercayaan pada angka yang sama. Sebaliknya, TNI berada pada posisi tertinggi dengan tingkat kepercayaan mencapai lebih dari 90 persen, disusul KPK dan Presiden yang masing-masing berada di atas 70 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya defisit kepercayaan yang signifikan terhadap partai politik dibandingkan lembaga negara lainnya. Kondisi tersebut membentuk hubungan sebab-akibat yang saling memperkuat, yaitu pelaksanaan pendidikan politik yang tidak substantif mengakibatkan masyarakat kurang memahami peran dan fungsi partai, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Rendahnya kepercayaan publik tersebut, pada gilirannya semakin melemahkan efektivitas pendidikan politik yang dijalankan partai karena masyarakat enggan menerima dan terlibat dalam program-program yang diselenggarakan. Siklus tersebut pada akhirnya memperlemah seluruh fungsi

strategi partai, termasuk dalam membangun kesadaran politik dan mempersiapkan pemilih yang rasional dan bertanggung jawab.

Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan politik membawa dampak yang lebih luas bagi kualitas demokrasi secara menyeluruh. Masyarakat yang tidak mendapat pendidikan politik yang memadai cenderung bersikap apatis terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melahirkan penyelenggara negara yang kurang bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi, menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, lemahnya pendidikan politik melemahkan kontrol sosial dan membatasi kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dalam mengembangkan kapasitas politik serta berperan aktif sebagai warga negara yang kritis dan partisipatif.

Persoalan lemahnya pendidikan politik tersebut tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan di tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini memiliki signifikansi demografis serta elektoral yang sangat strategis dalam peta politik nasional. Berdasarkan publikasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2023 mencapai sekitar 37,9 juta jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Pemilu 2024, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga di Indonesia, yakni sebanyak 28.289.413 pemilih (KPU, 2024). Selain itu, provinsi ini juga menempati urutan ketiga dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)

terbanyak secara nasional, yaitu sebanyak 117.299 TPS yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah bukan hanya memiliki basis politik yang kuat secara historis, melainkan juga merupakan arena strategis yang memungkinkan pendidikan politik partai memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku politik masyarakat dalam skala yang berdampak secara nasional.

Dalam konteks strategis tersebut, pendidikan politik di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari peran partai-partai besar yang memiliki basis historis maupun ideologis yang kuat di wilayah ini. Dua partai di antaranya yang paling menonjol adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemilihan kedua partai ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merepresentasikan dua basis ideologi yang berbeda secara mendasar dalam spektrum politik Indonesia. PDI Perjuangan merepresentasikan corak nasionalis-populis yang telah lama mengakar di Jawa Tengah, sedangkan PKS menampilkan karakter religius-Islam dengan penekanan pada kaderisasi dan jaringan dakwah. Perbedaan ideologis yang mendasar ini menjadikan keduanya objek perbandingan yang relevan untuk mengkaji bagaimana orientasi ideologi membentuk pendekatan pendidikan politik yang berbeda. Keduanya juga secara konsisten menjadikan pendidikan politik sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan ideologi sekaligus memperkuat basis organisasi partai, meskipun berangkat dari latar yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu periode ketika dinamika organisasi dan program kedua

partai dapat diamati secara langsung, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan pendidikan politik dalam kurun waktu tersebut.

Secara historis, Jawa Tengah dikenal sebagai basis politik tradisional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang secara konsisten mendominasi perolehan suara dalam beberapa Pemilu terakhir. Kuatnya basis dukungan ini erat kaitannya dengan warisan politik Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang masih memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat Jawa Tengah. PDI Perjuangan memperkuat posisinya melalui struktur kepartaian yang solid hingga tingkat akar rumput, sehingga membentuk jaringan politik yang masif dan terorganisir dengan baik. Di samping itu, kehadiran figur-figur kepemimpinan yang memiliki daya tarik kuat, seperti Megawati Soekarnoputri dan beberapa kepala daerah populer yang diusung partai ini, turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dukungan di wilayah tersebut. Kekuatan elektoral tersebut tidak terlepas dari upaya sistematis partai dalam membangun kesadaran ideologis kadernya. Sebagai bagian dari strategi konsolidasi dan penguatan ideologi, PDI Perjuangan menjalankan pendidikan politik sesuai AD/ART partai bagian ketiga fungsi partai politik pasal 9. Kekuatan partai juga tercermin dari falsafah dan ideologi yang menjadi dasar kaderisasinya, dikenal sebagai “Soekarnoisme,” yang menekankan pemahaman nilai-nilai Marhaenisme Soekarno.

Memasuki tahun 2024, dinamika persaingan antar partai di Jawa Tengah memperlihatkan pergeseran yang cukup signifikan. PDI Perjuangan yang selama ini menjadi kekuatan dominan di provinsi ini ternyata mengalami pelemahan konsistensi perolehan suara di sejumlah daerah, menandai terjadinya erosi

dukungan yang sebelumnya dianggap mapan. Pada saat yang sama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara historis bukan partai dominan di Jawa Tengah, mulai memperlihatkan pertumbuhan dukungan yang signifikan di sejumlah wilayah yang sebelumnya bukan basis tradisionalnya. Fenomena ini menjadi latar belakang kontekstual yang relevan untuk memahami bagaimana kedua partai mengelola pendidikan politiknya, terutama melalui jaringan kaderisasi berbasis komunitas, penguatan isu moral dan religius, serta pendekatan langsung ke kelompok pemilih muda. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa fokus penelitian ini bukan pada dinamika elektoral itu sendiri, melainkan pada bagaimana program pendidikan politik dirancang dan dijalankan oleh kedua partai sebagai fungsi organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Sebagai partai berbasis Islam yang lahir dari gerakan reformasi dan dakwah, PKS menjalankan pendidikan politik berdasarkan AD/ART partai bagian ketiga tentang fungsi partai politik Pasal 9, dengan menjunjung tinggi komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus berupaya memperluas jangkauan pengaruh partai hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di luar basis dukungannya. Fenomena ini sekaligus menggarisbawahi urgensi untuk mengevaluasi program pendidikan politik yang dijalankan oleh kedua partai secara komparatif. Perbedaan orientasi ideologis, strategi organisasi, dan pendekatan sosialisasi yang diterapkan masing-masing partai tidak hanya membentuk kualitas kader, tetapi juga memberikan dampak

nyata terhadap pola partisipasi politik masyarakat di Jawa Tengah sebagai provinsi yang memainkan peran strategis dalam kontestasi politik nasional.

Untuk memperkuat posisi penelitian, berikut dipaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema pendidikan politik. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan sekaligus pembanding dalam membangun kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dari Supratiwi, dkk (2021) mengungkapkan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting yang secara konsisten dikaji dalam konteks peran lembaga maupun partai politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa dalam Pilkada dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi, meskipun pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pendidikan politik diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menumbuhkan literasi politik serta pemahaman atas hak dan kewajiban warga negara. Pelaksanaannya tidak terbatas pada pendekatan tatap muka, melainkan dapat pula berlangsung melalui sosialisasi tidak langsung dengan memanfaatkan platform digital. Pemanfaatan platform seperti Youtube menjadi saluran efektif dalam menyampaikan pesan politik kepada mahasiswa sebagai kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis daring ini berkontribusi pada peningkatan literasi, kesadaran, serta partisipasi mahasiswa dalam setiap tahapan Pemilu.

Selanjutnya, dalam kajian yang secara khusus menelaah fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik, Munggaran (2023) menegaskan bahwa partai politik tidak sekadar berfungsi sebagai wadah partisipasi politik, melainkan juga merupakan institusi yang memiliki kewajiban substantif dalam mendidik masyarakat melalui pendidikan politik. Melalui penelaahan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, kajian tersebut menganalisis fungsi partai dalam menyelenggarakan pendidikan politik secara sistematis. Temuan kajian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan politik dapat ditumbuhkan oleh partai politik melalui berbagai jalur, yakni sosialisasi politik, pelaksanaan program pendidikan politik, serta kegiatan kampanye. Fungsi tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya politik yang baik, tetapi juga berperan dalam mencegah praktik negatif seperti politik uang, kampanye hitam, dan jual beli suara.

Sejalan dengan topik tersebut, dengan menempatkan fokus pada agen-agen sosialisasi politik dalam pembentukan orientasi politik generasi muda, Rahayaan (2024) mengkaji sejauh mana diskusi politik dalam lingkungan keluarga serta konsumsi informasi dari media massa dapat membentuk kesadaran dan keterlibatan politik pemilih pemula dalam konteks Pemilihan Umum Presiden 2024 di Kota Semarang. Melalui pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatori dengan menjadikan 250 pemilih pemula berusia 17–21 tahun sebagai subjek penelitian, kajian tersebut menemukan bahwa arahan dan motivasi dari orang tua merupakan faktor dominan dalam pembentukan kesadaran politik, sementara media massa berfungsi sebagai agen sekunder yang melengkapi proses pendidikan politik dalam

keluarga. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula, dengan keluarga yang menunjukkan pengaruh lebih besar dibandingkan media massa.

Penelitian lain membahas topik transformasi pendidikan politik melalui media digital, Panggabean (2025) mengkaji fenomena adaptasi platform digital dalam merespons dinamika politik kontemporer guna menyajikan pendidikan politik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam Website *Bijakmemilih.id*. Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa platform digital yang dikaji mampu menjalankan fungsi pendidikan politik secara komprehensif, mencakup pemaparan ideologi partai, peningkatan literasi politik melalui fitur interaktif seperti kuis, serta fasilitasi partisipasi publik dengan melibatkan berbagai aktor politik. Keberhasilan platform tersebut tercermin dari capaian 11 juta tampilan laman dan rata-rata 1,4 juta pengunjung, yang mengindikasikan efektivitasnya sebagai media pendidikan politik modern. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan, khususnya terkait fitur aksesibilitas yang belum inklusif dan ketiadaan komunikasi dua arah yang membatasi potensi diskusi interaktif antar pengguna.

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, Buana, Erlina, dan Rahman (2021) mengkaji kelemahan paradigma pendidikan politik di internal partai, khususnya yang berkaitan dengan penguatan peran politisi perempuan dalam isu antikorupsi dan kesetaraan gender. Kajian tersebut menyoroti bagaimana pendidikan politik yang seharusnya bersifat emansipatoris justru masih menempatkan Perempuan sebatas instrumen pelestarian politik dinasti. Melalui pendekatan hukum

interdisipliner yang diterapkan pada lima partai politik dengan melibatkan politisi perempuan yang memiliki rekam jejak dalam isu antikorupsi dan gender, kajian ini menemukan bahwa materi pendidikan politik yang ada masih terpusat pada figur pendiri partai, minim substansi antikorupsi dan perspektif kesetaraan gender, serta ditopang oleh sistem rekrutmen yang tidak berorientasi pada kapasitas dan kompetensi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa partai politik pada umumnya belum menempatkan pendidikan politik sebagai investasi strategis jangka panjang dalam penguatan kualitas demokrasi.

Berdasarkan pemaparan sejumlah kajian di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian mengenai pendidikan politik telah mengalami perkembangan yang cukup beragam, mencakup berbagai perspektif analitis mulai dari pengaruh agen sosialisasi primer seperti keluarga dan media massa, transformasi pendidikan politik melalui platform digital, hingga kritik terhadap paradigma pendidikan politik di internal partai dalam kaitannya dengan isu antikorupsi dan kesetaraan gender. Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih menyisakan kekosongan analitis yang cukup mendasar, terutama dalam menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Sebagian besar penelitian cenderung memosisikan masyarakat sebagai objek penerima pendidikan politik, sementara praktik pendidikan politik yang dijalankan oleh partai sebagai penyelenggara justru jarang dikaji secara kritis. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara spesifik membandingkan praktik pendidikan politik antara partai dengan basis ideologi yang berbeda secara mendasar, seperti partai nasionalis-kerakyatan dan partai berbasis Islam, di tingkat provinsi dalam kurun waktu

tertentu. Ketiadaan analisis komparatif semacam ini menyebabkan pemahaman mengenai bagaimana orientasi ideologi membentuk arah, metode, dan tujuan pendidikan politik partai menjadi kurang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan kerangka analisis komparatif pendidikan politik berbasis partai politik dengan ideologi berbeda dalam konteks lokal di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu barometer politik nasional, guna memberikan kontribusi akademis dan pemahaman yang lebih kritis mengenai relasi antara pendidikan politik, ideologi partai, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan lebih mendalam untuk mengkaji pendidikan politik yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedua partai tersebut merancang pendekatan, memilih media dan materi, menentukan sasaran, serta membentuk dampak pendidikan politik terhadap pemilih. Dari perbandingan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai variasi pola pendidikan politik partai politik di tingkat lokal, sekaligus memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi penguatan demokrasi. Berdasarkan fokus tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Pendidikan Politik oleh Partai Politik di Jawa Tengah (Perbandingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari program pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dari program pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan program pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat secara luas.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam literatur keilmuan dalam bidang pendidikan politik, utamanya berkenaan dengan peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik di

tingkat provinsi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan wawasan serta pemahaman baru bagi peneliti, pembaca, dan komunitas akademik mengenai praktik pendidikan politik dan faktor yang mempengaruhi praktik pendidikan politik secara kongkret di lapangan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah bagi para peneliti berikutnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan tema serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata terkait keberlangsungan program pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik di Jawa Tengah secara berkelanjutan. Selain hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus kontribusi bagi partai politik dalam melaksanakan evaluasi terhadap program pendidikan politik yang telah diimplementasikan, serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menyusun regulasi pendidikan politik yang lebih substantif dan terukur dampaknya.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Sebuah penelitian dilakukan dalam rangka mencari jawaban untuk dapat memecahkan suatu masalah dan harus berpedoman pada dasar yang kuat seperti teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli agar dapat memperoleh hasil yang sempurna. Di samping itu, kerangka pemikiran teoritis dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memperkuat argumentasi hasil penelitian. Dalam rangka menganalisis permasalahan yang dikaji, penelitian ini berlandaskan pada sejumlah teori dan konsep yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

### **1.5.1 Pendidikan Politik (*Political Education*)**

Pendidikan Politik (*Political Education*) merupakan suatu proses yang dirancang secara terencana dan sistematis dengan tujuan membentuk individu menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik suatu negara. Konsep dasar pendidikan politik dapat dipahami dengan cara memformulasikan informasi yang perlu diketahui masyarakat agar menjadi efisiensi dan efektivitas bagi kehidupan manusia. Konsep politik merupakan rumusan dalam suatu konsep yang mereduksi informasi secara proporsional agar dapat ditangani. Konsep politik diterapkan melalui pendidikan politik secara transparan, akuntabel, dan sistematis (Saptadi dkk, 2024).

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik dalam demokrasi. Secara konseptual, pendidikan politik dimaknai sebagai proses yang terencana dan terstruktur dalam membentuk individu menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta memiliki orientasi politik yang jelas. Kantraprawira (2006) mendefinisikan *Political Education* sebagai kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara.

Dalam kerangka yang lebih luas, Jacobus Ranjabar (2019: 233) menegaskan bahwa, pendidikan politik yang menjadi bagian dari pendidikan orang dewasa itu tidak menonjolkan kultivasi individu sebagai 'pembeo politik', atau sebagai 'pribadi terisolasi' dari masyarakat, akan tetapi menekankan realisasi diri manusia di tengah medan sosial, dalam suatu konteks politik dengan semua aspek sosial budayanya.

Juga di tengah situasi situasi konflik yang disebabkan oleh macam-macam perbedaan atau pluriformitas. Sebagai akibat dari kepentingan dan visi yang berbeda-beda, yaitu yang didukung oleh kelompok yang pro atau justru ditentang oleh kelompok yang kontra, maka politik adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pendidikan politik berfungsi membekali masyarakat dengan wawasan dan pemahaman mengenai berbagai persoalan politik, struktur dan mekanisme pemerintahan, hak serta kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi.

Adapun tujuan dari pendidikan politik dapat ditinjau dari dua perspektif yang bersifat saling melengkapi, Dari perspektif partai politik sebagai penyelenggara, Solly Lubis (1989:90) mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk kader-kader yang tangguh dan berkualitas maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan. Sementara itu, dari perspektif individu sebagai penerima pendidikan politik, Kartono (2009) merumuskan dua tujuan yang lebih spesifik dan berorientasi pada pemberdayaan warga negara. Pertama, membuat masyarakat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat, aktif dalam proses demokrasi, serta sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Kedua, memperhatikan peranan Insani dari setiap individu sebagai warga negara dengan mengembangkan semua bakat dan kemampuannya yang mencakup pengetahuan, wawasan, sikap, dan

keterampilan agar ia dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara. Kombinasi perspektif Solly Lubis dan Kartono tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ideal harus mampu bekerja pada dua level sekaligus yaitu membangun kapasitas institusi partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan bisa memberdayakan individu warga negara untuk menjadi partisipan politik yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.

Secara normatif, pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 31 Ayat (1), partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab dalam memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam literatur berbahasa Inggris, pendidikan politik kerap dipadankan dengan istilah *political socialization*. Kedua konsep tersebut memiliki makna yang saling berkaitan dan dapat dipertukarkan penggunaannya dalam berbagai konteks kajian politik, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam berbagai

konteks pendidikan politik. Dalam kerangka sosialisasi politik, pendidikan politik dipahami sebagai bentuk sosialisasi politik langsung. Dawson dalam Haryanto (2018) membedakan metode sosialisasi politik menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung menekankan pada materi yang bermuatan politik secara eksplisit, sementara metode tidak langsung membawa dampak politik secara lebih implisit. Pendidikan politik termasuk dalam kategori metode langsung, di mana terdapat upaya nyata untuk mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan partai politik. Dalam pendidikan politik, inisiatif penyelenggara sosialisasi berada di tangan agen sosialisasi dan keberhasilan transmisi materi sangat bergantung pada keaktifan agen tersebut, meski sangat bergantung pada keaktifan agen tersebut, meski peran penerima tetap memberikan andil dalam proses sosialisasi.

Sejalan dengan itu, Rush dan Altoff (1971) menyebut partai politik sebagai salah satu dari enam lembaga agen sosialisasi politik, di samping keluarga, sekolah, *peer group*, *media massa*, dan pemerintah. Aktivitas sosialisasi politik yang dilakukan secara terstruktur di semua tingkatan organisasi partai dikenal sebagai pendidikan politik oleh partai politik. Sardini dan Fitriyah (2021) menjelaskan bahwa partai politik dapat menjalankan peran ideal sebagai agen sosialisasi politik melalui tiga jalur sekaligus yaitu menyelenggarakan pendidikan politik terstruktur kepada anggota maupun non anggota, memberikan keteladanan perilaku melalui anggotanya yang menduduki jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi sumber motivasi budaya politik demokrasi bagi masyarakat luas.

Berdasarkan kerangka di atas, penelitian ini menggunakan konsep pendidikan politik untuk menganalisis dan membandingkan pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah pada tahun 2024. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai tolak ukur kesesuaian pelaksanaan pendidikan politik oleh kedua partai tersebut.

### **1.5.2 Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)**

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan konsep universal yang meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang kehidupan masyarakat politik sekaligus mempersiapkan individu untuk terlibat secara menyeluruh dalam proses politik. Kerr (1999:6) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan secara luas sebagai proses penyiapan generasi muda untuk berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara, yang mencakup persekolahan, pengajaran, dan proses belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Sementara itu, Cogan (1999:4) dalam Arwiyah & Runik, 2014 membedakan dua pengertian pendidikan kewarganegaraan, yaitu *civic education* sebagai mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang mempersiapkan warga negara berusia muda dan *citizenship education* sebagai pengalaman belajar yang lebih luas, baik di sekolah maupun di luar sekolah, mencakup lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan media.

Secara epistemologi, Winataputra (2016) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu (*integrated knowledge system*) yang berfungsi sebagai wahana pendidikan demokrasi. Sistem

ini mengandung tiga dimensi konseptual yang bersifat holistik, yakni studi kewarganegaraan dalam pendidikan formal maupun informal, serta praksis kewarganegaraan yang diaktualisasikan dalam aktivitas sosio-kultural-edukasi di masyarakat. Dimensi praksis inilah yang menjadikan konsep tersebut relevan untuk mengukur efektivitas program pendidikan politik partai, karena partai politik pada dasarnya adalah salah satu arena di mana praksis kewarganegaraan itu terjadi secara nyata.

Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang diwujudkan melalui tiga paradigma yaitu *learning about democracy*, *learning through democracy*, dan *learning for democracy* (CIVITAS Internasional;1994 dalam Winatapura, 2016). Ketiga paradigma tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal bukan sekedar transfer pengetahuan tentang demokrasi, melainkan harus dijalani dan dipraktikkan secara langsung. Dalam konteks ini, partai politik memiliki posisi strategis yang mampu mendorong masyarakat untuk benar-benar terlibat dalam proses demokrasi.

### **1.5.3 Pendidikan Pemilih (*Voter Education*)**

Pendidikan pemilih (*voter education*) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu maupun dalam penguatan demokrasi secara keseluruhan. Secara formal, peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 mendefinisikan pendidikan pemilih sebagai Proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mereka tentang Pemilu. Definisi lain dari Hayer dalam Kartini Kartono (2009) yang mengemukakan bahwa,

dalam kaitannya dengan *voter education* yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk membentuk manusia agar menjadi partisipan yang lebih bertanggung jawab dalam dunia politik. Pendidikan pemilih harus senantiasa bisa mendidik manusia sebaik-baiknya, agar mereka melek politik, artinya setiap manusia diharapkan tetap melek politik sebagai generasi muda penerus harapan bangsa saat ini (Haerul, 2019). Sementara itu, Kantaprawira (2006) menambahkan bahwa, *voter education* merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan politik bagi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam sistem politiknya sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga negara yang berpartisipasi.

Namun demikian, Dwipayana dalam Rozuli dan Haboddin (2018) mengkritisi bahwa pendidikan pemilih yang selama ini dipraktikkan cenderung bersifat formalistik karena sekedar memberikan pemahaman teknis tentang prosedur pemberian suara, tanpa menyentuh dimensi yang lebih substantif. Adapun hakikat pendidikan pemilih yang sesungguhnya adalah menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus meningkatkan martabat politik warga negara, dari sekedar menjadi *votes* (pemilik suara) menjadi *voice* yaitu warga negara yang memiliki suara bermakna dan mampu berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas. Dengan kata lain, pendidikan pemilih yang ideal tidak hanya menghasilkan pemilih yang tahu cara mencoblos, tetapi juga warga negara yang aktif, kritis, dan mampu mengontrol kekuasaan politik.

Dalam kaitannya dengan perilaku memilih, Anthony Downs dalam Efriza (2012) ada dua cara atau sifat perilaku memilih yakni memilih rasional (*rational voters*) dan pemilih tradisional (*traditional voters*). Kelompok pertama adalah pemilih yang menggunakan hak pilih atas dasar rasio atau kehendak sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Sedangkan yang kedua adalah pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas dasar kehendak atau kemauan sendiri melainkan atas dorongan orang lain seperti orang tua, tokoh masyarakat, maupun pemerintah. Dalam rangka membentuk rasionalitas perilaku memilih, khususnya di kalangan pemilih pemula, pendidikan pemilih (*voter education*) diselenggarakan oleh berbagai pihak, antara lain partai politik, KPU, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan kerangka tersebut, tujuan pendidikan pemilih mencakup:

1. Menumbuhkan kesadaran politik sejak dini.
2. Mempersiapkan individu menjadi aktor politik dalam lingkungannya.
3. Pendidikan elektoral (Sistem Pemilu).
4. Pendidikan kewarganegaraan.
5. Prosedur Pemilu yang demokratis.
6. Akuntabilitas Pemilu maupun penyelenggaraan negara.

Dalam konteks penelitian ini, konsep pendidikan pemilih digunakan untuk menganalisis apakah program pendidikan politik yang dilaksanakan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah pada tahun 2024. Konsep ini digunakan untuk melihat sejauh mana pendidikan politik berkontribusi dalam membentuk pemilih

yang memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi.

#### **1.5.4 Ideologi Partai (*Ideological Parties*)**

Ideologi secara luas menurut Kristeva (2010) menjelaskan bahwa Ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata: *ideos* yang berarti pemikiran, dan *logis* yang berarti logika atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Kedua kata tersebut merupakan ungkapan yang memiliki daya gerak luar biasa dalam membangkitkan pemikiran dan semangat hidup di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan kaum intelektual. Lebih lanjut, Kristeva (2010) menegaskan bahwa Ideologi merupakan pemikiran mendasar dan patokan asasi tingkah laku, sekaligus menjadi *mythos* yang melahirkan doktrin politik (*political doctrine*) dan formula politik (*political formula*) dalam kehidupan bernegara.

Dalam perkembangannya, Kristeva (2010) mengidentifikasi tiga dimensi ideologi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi realitas, yaitu kemampuan ideologi untuk mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Kedua dimensi idealisme, yaitu kemampuan ideologi untuk merumuskan cita-cita dan gambaran masyarakat ideal yang ingin diwujudkan. Ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Ketiga dimensi tersebut relevan untuk memahami posisi ideologi PDI Perjuangan dan PKS karena keduanya mengalami proses adaptasi ideologi yang berbeda dalam respon dinamika politik Indonesia

pasca reformasi, Namun kedua partai tetap berusaha mempertahankan identitas ideologi masing-masing.

Dalam konteks partai politik, McClosky (1964: 362) sebagaimana dikutip dalam Firmanzah (2008) mendefinisikan *Ideological Parties* sebagai '*systems of belief that are elaborate. Integrated, and coherent, that justify the exercise of power, explain and judge historical event, identify political right and wrong, set forth the interconnections (causal and moral) between politics and othe sphere of activity*'. Berdasarkan definisi tersebut, *Ideological Parties* merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan konsisten dalam memberikan landasan rasional bagi penggunaan kekuasaan. Lebih dari itu, ideologi partai juga memainkan peran penting dalam memaknai berbagai peristiwa signifikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ideologi sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara ranah politik dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keadilan, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Sejalan dengan itu, Thompson (2004) sebagaimana dikutip dalam Firmanzah (2008) memandang bahwa dalam *Ideological Parties* termuat sistem pemikiran, sistem keyakinan, dan sistem simbol yang berhubungan dengan tindakan sosial dan praktik politik. *Ideological Parties* selalu hadir dalam setiap program politik, langsung ataupun tidak langsung dan sadar ataupun tidak sadar, serta menjadi ciri khas setiap gerakan organisasi politik. Dengan kata lain, *Ideological Parties* menjiwai setiap aktivitas organisasi partai politik, baik pernyataan, kritikan program, dan isu politik. Firmanzah (2008) menambahkan bahwa ideologi partai dapat merupakan perpaduan dari beberapa rumpun ideologi

besar sekaligus sebagai respons terhadap kompleksitas dinamika masyarakat modern, meskipun setiap partai tetap berusaha menjaga karakteristik identitas ideologinya sendiri.

Dalam konteks kehidupan politik, ideologi partai memiliki keterkaitan dengan pendidikan politik karena berfungsi sebagai dasar nilai dan orientasi bagi anggota maupun masyarakat. Kristeva (2010) mengidentifikasi beberapa fungsi ideologi yang menjelaskan keterkaitan tersebut. Pertama, fungsi etis yaitu ideologi berfungsi sebagai panduan nilai, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua, fungsi integrasi yaitu ideologi berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap kondisi atau kebijakan tertentu. Ketiga, fungsi praxis yaitu ideologi menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah konkret di masyarakat. Keempat, fungsi justifikasi yaitu ideologi berfungsi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh partai. Kelima fungsi ini menunjukkan bahwa ideologi bukan sekedar doktrin abstrak, melainkan sesuatu yang secara nyata mempengaruhi cara partai merancang dan melaksanakan program pendidikan politiknya kepada masyarakat.

Dengan demikian, ideologi partai dalam penelitian ini dipahami bukan hanya sebagai identitas formal yang tercantum dalam anggaran dasar partai, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan bekerja secara nyata dalam setiap program dan aktivitas partai termasuk dalam program pendidikan politik yang diselenggarakan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa tekanan pragmatisme elektoral yang semakin menguat di Indonesia

berpotensi membuat ideologi partai kehilangan daya tuntutnya dalam praktik nyata, sehingga perlu diuji secara empiris sejauh mana ideologi kedua partai tersebut benar-benar tercermin dalam program pendidikan politik mereka.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang direncanakan dan diselenggarakan oleh partai politik dengan tujuan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah dianalisis untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pendidikan politik yang dijalankan oleh kedua partai selama tahun 2024 dalam membangun pemahaman dan kesadaran politik masyarakat.

Pembatasan ini penting karena tidak semua kegiatan partai dapat dikategorikan sebagai pendidikan politik. Kegiatan yang bersifat mobilitas dukungan, kampanye, atau penggalangan massa tidak termasuk dalam pengertian tersebut. Pendidikan politik dalam konteks penelitian ini merujuk pada serangkaian kegiatan yang secara substansial bertujuan untuk membangun pemahaman politik di kalangan masyarakat, mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, serta membentuk sikap politik yang mandiri dan bertanggung jawab.

Sejauh mana program pendidikan kedua partai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politiknya, termasuk apakah

program tersebut menjangkau kelompok yang selama ini jauh dari akses informasi politik seperti pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat di daerah terpencil.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam demokrasi menjadi faktor penting agar pendidikan politik dapat berjalan secara efektif. Bentuk dan metode kegiatan yang digunakan kedua partai dalam menyelenggarakan program mereka di berbagai wilayah Jawa Tengah harus disesuaikan dengan masyarakat agar lebih banyak menarik audience.

Aspek kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan politik juga menjadi perhatian penting. Melalui program pendidikan politik yang dijalankan, kedua partai diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang menghargai perbedaan pilihan politik dan mampu menjalankan perannya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

Pendidikan politik dan partai politik menunjukkan hubungan yang saling berkaitan. Ketiga hal ini secara bersama-sama digunakan untuk menganalisis apakah program pendidikan politik PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi politik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran dan kapasitas politik masyarakat.

### **1.6.2 Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari program pendidikan politik yang diarahkan untuk membentuk warga negara yang cerdas secara politik, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah dikaji

sejauh mana program keduanya mampu menjalankan fungsi tersebut kepada masyarakat pada tahun 2024 sebagai periode penelitian.

Berbeda dari pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung secara formal di sekolah, yang dimaksud dalam kajian ini adalah pengalaman belajar kewarganegaraan yang terjadi melalui kegiatan yang diselenggarakan partai politik kepada masyarakat umum. Fokusnya bukan sekedar ada tidaknya program yang diselenggarakan, tetapi sejauh mana program tersebut secara substansial mampu membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, serta mampu terlibat secara aktif dan adaptif dalam dinamika kehidupan politik.

Sejauh mana materi yang disampaikan kedua partai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu hal yang dicermati, Termasuk apakah materi tersebut benar-benar menyentuh substansi kewarganegaraan secara luas atau hanya berhenti pada pengenalan visi misi partai semata.

Cara dan suasana penyelenggaraan kegiatan kedua partai turut menjadi perhatian. Kesesuaiannya dengan nilai-nilai demokratis seperti keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, ruang diskusi yang setara, dan sikap toleran terhadap keberagaman menjadi faktor penting, mengingat pendidikan kewarganegaraan yang ideal tidak hanya memuat substansi tentang demokrasi, tetapi juga harus

diselenggarakan dengan cara-cara yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Kecakapan masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dan mandiri dalam proses demokrasi, dalam program pendidikan tersebut diharapkan mampu membekali masyarakat dengan kemampuan nyata untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan politik secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Kajian ini pada akhirnya ingin melihat apakah program PDI Perjuangan dan PKS benar-benar membentuk warga negara yang berdaya, atau hanya berhenti pada tataran pengetahuan tanpa menyentuh sikap dan kecakapan yang lebih substantif.

### **1.6.3 Pendidikan Pemilih**

Pendidikan pemilih merupakan bagian dari program pendidikan politik yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah dikaji sejauh mana program keduanya mampu menjalankan fungsi tersebut kepada masyarakat pada tahun 2024 sebagai periode penelitian, yang bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Batas antara pendidikan pemilih dan kepentingan elektoral menjadi penting untuk ditegaskan dalam kajian ini. Kegiatan yang substansinya lebih mengarah pada penggalangan dukungan tidak masuk dalam kategori pendidikan pemilih yang dimaksud.

Sejauh mana program kedua partai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme Pemilu dan pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi menjadi salah satu hal yang dicermati, termasuk apakah masyarakat benar-benar memahami mengapa kehadiran mereka dalam Pemilu memiliki makna yang lebih besar dari sekadar memenuhi kewajiban formal sebagai warga negara.

Sejauh mana program kedua partai mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri berdasarkan pertimbangan rekam jejak, program, dan kompetensi kandidat turut menjadi perhatian, termasuk apakah terdapat kecenderungan kedua partai untuk mengarahkan pilihan masyarakat demi kepentingan elektoral mereka sendiri sebagai peserta Pemilu 2024.

Aspek jangkauan program juga menjadi dimensi yang dicermati dalam penelitian ini. Program pendidikan pemilih yang dijalankan kedua partai diharapkan mampu menyentuh kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili dalam proses politik, seperti pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat yang berdomisili di wilayah terpencil di Jawa Tengah.

Pada akhirnya, yang ingin dilihat adalah apakah PDI Perjuangan dan PKS benar-benar hadir sebagai agen pembentuk pemilih yang cerdas dan berdaya, atau justru hanya memanfaatkan pendidikan pemilih sebagai bungkus dari kepentingan elektoral dalam konteks Pemilihan Umum 2024.

#### **1.6.4 Ideologi Partai**

Ideologi partai merupakan sistem nilai dan keyakinan yang mendasari dan membimbing seluruh program serta tindakan partai politik dalam kehidupan berdemokrasi. PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah menjadi objek perbandingan untuk melihat apakah ideologi masing-masing benar-benar mewarnai program pendidikan politik yang mereka jalankan kepada masyarakat selama tahun 2024 sebagai periode penelitian.

Ideologi dalam kajian ini tidak dipahami sebagai doktrin formal yang tercantum dalam anggaran dasar partai semata. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana nilai-nilai ideologis kedua partai hidup dan terwujud secara nyata dalam tujuan, materi, metode, dan sasaran program pendidikan politik mereka di lapangan.

Konsistensi materi pendidikan politik kedua partai dalam mencerminkan nilai dan panduan etis yang bersumber dari ideologi masing-masing menjadi salah satu hal yang dicermati, termasuk ada tidaknya kesenjangan antara nilai yang diproklamasikan dengan muatan program yang sesungguhnya dijalankan di lapangan.

Kemampuan program kedua partai dalam mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap kondisi politik turut menjadi perhatian, termasuk apakah program yang dijalankan benar-benar memberdayakan nalar kritis masyarakat atau justru membatasi pemahaman politik masyarakat pada perspektif tertentu yang berasal dari partai.

Orientasi program pendidikan politik kedua partai dalam membangun pemahaman dan kesadaran politik masyarakat juga menjadi aspek yang dicermati, termasuk bagaimana nilai-nilai ideologi partai diterjemahkan dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik.

Ideologi dan pendidikan politik menunjukkan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Yang ingin dilihat adalah apakah keduanya benar-benar berjalan beriringan dalam program PDI Perjuangan dan PKS, ataukah ideologi hanya hadir sebagai label tanpa mewarnai substansi pendidikan politik yang sesungguhnya.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk menemukan, menguji kebenaran, dan mengembangkan teori dalam ilmu pengetahuan terkait fenomena yang sedang diteliti. John W. Creswell menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang mempersoalkan cara-cara dalam melaksanakan penelitian meliputi teknik pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi data yang digunakan peneliti dalam kinerja penelitiannya (Creswell, 2016: 332). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada penggalian makna dan penjelasan secara mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Secara lebih spesifik, pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif-deskriptif, sebab penelitian ini berupaya menggambarkan dan menguraikan secara mendalam fenomena pendidikan politik yang diselenggarakan oleh kedua partai, termasuk mendeskripsikan perbedaan di antara keduanya serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2016) Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang berusaha memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks kajian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif dalam menguraikan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Jawa Tengah secara utuh dan bermakna. Melalui penerapan metode ini, peneliti dapat menggali secara lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, serta pandangan para pengurus dan kader partai berkenaan dengan bentuk program, strategi pelaksanaan dan evaluasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pemilihan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis fenomena pendidikan politik yang dijalankan oleh kedua partai dengan latar belakang ideologi yang berbeda. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau menemukan hubungan sebab-akibat, melainkan untuk menghasilkan gambaran yang utuh, rinci, dan faktual mengenai bagaimana PDI Perjuangan dan PKS merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan politik mereka di Jawa Tengah. Dengan karakter deskriptif tersebut, penelitian ini tidak sekadar mencatat fakta-fakta yang teramati di lapangan, tetapi

juga berupaya menguraikan secara mendalam berbagai dimensi, pola, dan dinamika yang membentuk perbedaan pendekatan kedua partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk mengkaji secara mendalam perbedaan strategi, nilai ideologis, dan implementasi program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan PKS di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil tiga lokasi penelitian, yaitu kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, kantor DPW PKS Jawa Tengah, dan kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Ketiga lokasi tersebut dipilih untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan politik pada dua partai politik, yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Analisis dilakukan dengan membandingkan program pendidikan politik antara kedua untuk melihat perbedaan pelaksanaan program tersebut. Kedua partai ini dipilih sebagai sarana bagi peneliti untuk mengkaji dan menilai sejauh mana kesesuaian program pendidikan politik yang mereka jalankan sepanjang tahun 2024 di Jawa Tengah.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu, kelompok, maupun Lembaga yang berperan sebagai sumber informasi bagi peneliti dalam proses pengumpulan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penentuan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keterlibatan langsung yang berkaitan erat dengan fokus kajian, sehingga informasi yang diperoleh dari mereka dinilai mampu memberikan

jawaban yang relevan dan komprehensif terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Daftar Informan (Subjek Penelitian)**

No.	Informan	Nama	Status/Jabatan
1.	Informan Utama/ Kunci	A. Baginda Muhammad Mahfuz H.	Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah
2.	Informan Utama/ Kunci	Untung Sujarno	Kepala Sekretariat DPC Kota Semarang
3.	Informan Utama/ Kunci	Angga Arrasyid DP.	Wakil Ketua Taruna Merah Putih
4.	Informan Utama/ Kunci	Dini Inayanti	Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga PKS
5.	Informan Utama/ Kunci	Dedy Endyanto	Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah
6.	Informan Utama/ Kunci	Julisa Ramadhan	Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PKS

Sumber: Diolah penulis dari Web PDI Perjuangan dan PKS, 2026

#### 1.7.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud berupa kata-kata, narasi, dan ungkapan yang mencerminkan pandangan, pemikiran, persepsi, serta pengalaman para informan terhadap fenomena yang dikaji. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus dan kader aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan politik partai.

Guna memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi, arsip, dan materi dari kedua partai tersebut. Data-data tersebut dianalisis

secara deskriptif untuk mengungkap makna di balik proses dan implementasi pendidikan politik yang dijalankan masing-masing partai. Jenis data kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana PDI Perjuangan dan PKS menjalankan fungsi pendidikan politiknya pada saat Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.7.5 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Adapun penjabaran dari sumber data tersebut, yakni sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari informan yang berhubungan dengan penelitian atau diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber pendukung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Data dari laman resmi dan dokumen arsip mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKS.
2. Jurnal Penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti: jurnal terkait perencanaan pendidikan politik, penyelenggaraan pendidikan politik dan evaluasi pendidikan politik.
3. Studi Pustaka dan Dokumentasi, seperti: Laporan penyelenggaraan pendidikan politik oleh Partai Politik, laporan resmi dari PDI Perjuangan dan PKS, undang-undang, buku, skripsi, maupun artikel yang berkaitan dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah menemukan data yang relevan. Kualitas pengumpulan data yang berhasil dihimpun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, sehingga pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat menjadi hal yang krusial. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yakni wawancara dan studi dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman, sudut pandang, maupun pemahaman mereka terhadap fenomena yang sedang diteliti. Creswell (2012) menjelaskan bahwa

wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti wawancara tatap muka, wawancara melalui telepon, maupun wawancara kelompok. Lebih lanjut, Creswell (2012) menjelaskan bahwa wawancara kualitatif umumnya menggunakan pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan partisipan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, serta opini mereka secara lebih luas terkait isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) baik secara langsung dengan berhadapan tatap muka maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti telepon bagi informan yang tidak dapat ditemui secara langsung. Penggunaan kedua cara tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat menjangkau seluruh informan secara lebih fleksibel tanpa mengurangi kedalaman informasi yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka sehingga informan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan, pengalaman, serta opini mereka secara luas dan tidak terbatas pada jawaban tertentu. Melalui teknik wawancara tersebut, peneliti memperoleh data mengenai proses penyelenggaraan, strategi, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan politik yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dan PKS di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan dan penelaahan terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan fokus kajian. Dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yakni dokumen resmi dan dokumen

tidak resmi. Dokumen resmi mencakup dokumen internal seperti catatan, pengumuman, peraturan perundang-undangan, regulasi kelembagaan, dan instruksi, serta dokumen eksternal seperti majalah, surat kabar, surat pernyataan, maupun dokumen yang bersumber dari platform digital. Sementara itu, dokumen tidak resmi umumnya berupa tulisan pribadi yang memuat pengalaman, tindakan, atau pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, terutama yang berkaitan dengan program, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan politik yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah.

#### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan Huberman (2007). Langkah analisis data dalam model ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses memilah, menyeleksi, dan meringkas data yang diperoleh selama penelitian dengan fokus pada hal-hal penting untuk mempertahankan informasi relevan dan membuang informasi yang tidak diperlukan, menentukan pola dari informasi yang dapat, serta memudahkan analisis lebih lanjut, yang dilakukan dengan memanfaatkan catatan lapangan untuk menghasilkan gambaran yang jelas, dan menyusun data

menjadi bahan analisis yang dapat diverifikasi hingga mencapai kesimpulan akhir.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan penyusunan dan pengorganisasian data yang telah direduksi menjadi bentuk teks naratif maupun matriks, grafik, dan gambar. Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2008), mengemukakan penyajian data penelitian kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dimengerti sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi, dengan begitu penelitian lebih mudah dalam menarik kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil poin-poin penting atau menarik benang merah dari data-data yang telah diolah dan disajikan. Kesimpulan juga akan diverifikasi kebenarannya yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian.

### **1.7.8 Kualitas Data**

Data-data yang didapatkan selama proses penelitian akan diuji untuk memastikan tingkat keakuratan, relevansi, dan validitas data. Hasil dari penelitian seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi nantinya akan dihimpun dan diverifikasi kebenarannya agar dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan keterangan yang

diperoleh dari pengurus partai, kader aktif, serta dokumentasi. Data yang telah melalui proses pengujian ini akan menghasilkan analisis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan.